

KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PROGRAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19

ACHMAD ADI SYAPUTRA
NPP. 29.0616

*Asdaf Provinsi Jawa Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:

syaputraachmadadi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). Organizational performance is an important factor in determining the achievement of organizational goals. Often face problems related to recipient data and the lack of socialization to the community as beneficiaries. **Objective:** in order to analyze the performance of the Social Service in the distribution of Cash Social Assistance to the Community of Kotabumi Ilir Village, Kotabumi District, North Lampung Regency. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result:** Productivity indicators, to distribute BST evenly, it is carried out through community monitoring in Kotabumi Ilir Village by means of Enumerators and TKSK, as well as updating existing data. Based on the quality of service, to equalize BST, it can be done by updating the data periodically, proposing data for new recipients who are indeed entitled to receive assistance, and validating the data. **Conclusion:** Based on the responsiveness indicator, officers must correct and update recipient data quickly and responsively, make a complaint book, and develop an application for checking Bansos to make it easier for the public to submit proposals and complaints. Based on the indicators of responsibility, the Social Service should directly supervise the implementation of BST distribution activities to the community, evaluate and improve data according to conditions in the field. Based on accountability indicators, BST distribution activities in Kotabumi Ilir Village have not been carried out in an accountable manner because many invalid data have been found since 2017.

Keywords: *Cash Social Assistance Distribution Performance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Kinerja organisasi termasuk faktor penting dalam menentukan tercapainya tujuan organisasi. Seringkali menghadapi persoalan terkait data penerima dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima bantuan. **Tujuan** guna menganalisa kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** indikator Produktivitas, untuk pemeratakan penyaluran BST dilaksanakan melalui pemantauan masyarakat di Kelurahan Kotabumi Ilir dengan cara Enumerator dan TKSK, serta memperbarui data yang ada. Berdasarkan kualitas pelayanan, untuk pemeratakan BST dapat dilakukan dengan memperbarui data secara berkala, mengusulkan data penerima baru yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan, serta memvalidasi data. **Kesimpulan:** Berdasarkan indikator responsivitas, petugas harus memperbaiki dan memperbaharui data penerima dengan cepat dan tanggap, membuat buku pengaduan, serta mengembangkan aplikasi pengecekan Bansos guna memudahkan publik dalam menyampaikan usulan dan komplain. Berdasarkan indikator responsibilitas, pihak Dinas Sosial seharusnya secara langsung mengawasi pelaksanaan aktivitas penyaluran BST kepada masyarakat, mengevaluasi dan memperbaiki data sesuai kondisi di lapangan. Berdasarkan indikator akuntabilitas, kegiatan penyaluran BST di Kelurahan Kotabumi Ilir belum terlaksana secara akuntabel sebab banyak ditemukan data yang tidak valid sejak tahun 2017.

Kata kunci: Kinerja Penyaluran Bantuan Sosial Tunai



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alinea Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutuskan bahwa negara bertanggung jawab guna memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Pemerintah memiliki beban yang berat, penduduk yang besar, wilayah yang tersebar, namun kemampuan anggaran negara yang tidak besar, menjadikan amanat ini penuh tantangan. Pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengeluarkan kebijakan dan program penurunan angka kemiskinan dan dengan hasil yang baik. Indonesia, 2 Maret 2021). Covid 19 merupakan virus yang terus mewabah masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Kejadian ini pertama kali terjadi di Kota Wuhan pada akhir Januari hingga awal Februari 2020. Masalah sosial ekonomi *Coronavirus Disease-19* semakin merugikan masyarakat. Masalah sosial ekonomi dengan *Coronavirus Disease-19* antara lain kelangkaan barang, diskriminasi terhadap pasien Covid 19, meningkatnya kriminalitas, sektor pariwisata yang melemah, serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran (Alifa, 2020). Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya mengatasi dampak Ekonomi berdasarkan pandemi *Coronavirus Disease-19* dengan memberikan dukungan sosial kepada masyarakat terdampak. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara bertanggung jawab untuk menanggulangi dampak Covid-19 selain menanggulangi kesejahteraan sosial lainnya. Prose penyaluran bansos yang dilakukan tak terlepas dari permasalahan-permasalahan, kendala administrasi, KPM tidak bisa berdagang karena kartu diblokir oleh pusat dan batas waktu (Sari, 2021). Pada pandemi *Covid-19* sekarang ini diharapkan dan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat selama masa pandemi. Anda perlu melakukan penyesuaian untuk menghindari duplikasi, terutama sampai Anda memiliki lebih banyak penerima. Kota perannya sangat penting dalam penanganan *Corona Virus Disease-19* dan hasilnya. Kertas Lula dan Walikota adalah faktor nomor satu dalam mendistribusikan dukungan sosial secara merata kepada mereka yang terkena dampak dan mereka yang benar-benar membutuhkannya, dan agar program dukungan sosial efektif dan terarah, diperlukan pengawasan masyarakat untuk memastikannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ditunjukkan tersebut, penulis penelitian yang berjudul **“KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PROGRAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kinerja organisasi termasuk faktor penting dalam menentukan tercapainya tujuan organisasi. Seringkali menghadapi persoalan terkait data penerima dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima bantuan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, dilaksanakan Rezky Amalia Permata Sari Tahun 2021 yang berjudul “Monitoring dan Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi” Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun Hasil penelitian ini Penilaian pelaksanaan BPNT juga didasarkan pada enam kriteria: efisiensi, efektivitas, validitas, kewajaran dan akurasi. Masalah terbesar dalam pelaksanaan distribusi bantuan adalah keakuratan penerima atau KPM karena data tidak cepat diperbarui. Kedua Fadhila nur fitria, dkk. (2021) berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020” Menggunakan Metode

Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas kesejahteraan tunai (BST) telah direalisasikan dengan optimal. Hal ini dikarenakan BST sebanyak 9 tahap tersebut telah tersalurkan kepada masyarakat sebagai penerima, namun pada 3 tahap terakhir BST disalurkan secara bersamaan dalam satu waktu. Persoalan yang ditemukan selama penyaluran bantuan covid 19 ini yaitu minimnya sosialisasi dari Pemda mengenai adanya bantuan tersebut, alhasil banyak dari masyarakat tidak paham mengenai jenis bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Ketiga, Aldi Sajjan Tahun 2021, Berjudul berjudul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tangerang”. Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni menunjukkan standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan program BST di Kota Mataram sangat efektif. Selain itu, dari segi prosedural, meskipun dukungan satu bulan tidak mencukupi, namun dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Dari sisi lingkungan (ekonomi, sosial, politik), pelaksanaan program BST masih kontroversial, terutama dalam masalah di mana masih ditemukan duplikat data dan di KPM. Keempat, Nindya Cahya Rosadi, Tahun 2021, Berjudul “Inovasi Perizinan Pelayanan Melalui Si-Imut di Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang”. Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni m tepatnya RT 02 RW 03 yang memberikan BST di perumahan Taman Chikande telah dilaksanakan seefektif mungkin dan memenuhi indikator efektivitas, yaitu tercapainya tujuan baik waktu maupun sarannya, pelaksanaannya terintegrasi, dan masyarakat sudah mulai beradaptasi. Meskipun pemberian bantuan ini sifatnya pasif sebab hanya mengandalkan donasi, sehingga bantuan ini tidak cukup. Kelima, Fadhila nur fitria, dkk.(2021) dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”. Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni yang menjadi Persoalan yang ditemukan selama penyaluran bantuan covid 19 ini yaitu minimnya sosialisasi dari Pemda mengenai adanya bantuan tersebut, alhasil banyak dari masyarakat tidak paham mengenai jenis bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak. Berdasarkan indikator ketepatan sasaran, peneliti menilai masih banyak ditemukan ketumpangtindihan data penerima bantuan, sehingga ketepatan sasaran ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini telah dijabarkan penulis, berikut ini: Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Menurut sugiyono (2010:137)

pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data. Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen". Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19

A. Produktivitas

Teori Produktivitas menurut Dwiyanto (2006: 5051) berguna untuk mengukur efisiensi pelayanan, yang biasanya dikaitkan antara input dan output. Produktivitas sebagai salah satu metrik kinerja utama, mengingat jumlah layanan publik yang memberikan hasil yang diharapkan, meningkatkannya produktivitas. Berdasarkan pengukuran efektivitas terhadap tingkat pencapaian produktivitas pemerataan penyaluran Dana BST di Kelurahan Kotabumi Ilir dapat dinyatakan sudah baik. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerataan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Kotabumi Ilir dilakukan pemantauan melalui Enumerator dan TKSK. Jika ditemukan ketidakvalidan data, dengan segera pihak Dinas Sosial akan memperbaiki data tersebut, hal ini dilakukan dengan harapan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan tersebut. Perbaikan data ini dilakukan pada nama-nama yang tercatat dalam DTKS dan tidak mendapatkan BST dan masyarakat yang tidak mampu dan berhak mendapatkan BST. Hal ini dilakukan untuk mencapai pemerataan penyaluran BST secara optimal.

B. Kualitas layanan

Menurut pendapat Dwiyanto (2006: 5051) mengenai Kualitas pelayanan yaitu untuk mempertanggungjawabkan Kinerja organisasi pelayanan publik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan lembaga publik seringkali menimbulkan opini negatif tentang lembaga publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pelayanan publik bahwa masyarakat merupakan obyek dari pelayanan tersebut. Suatu kinerja dikatakan berkualitas apabila kinerja tersebut sesuai atau melebihi standar yang ditetapkan. Kualitas pelayanan dapat menggambarkan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Adapun kualitas pelayanan dilihat berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan tersebut. Dinas Sosial terus melakukan upaya untuk pemerataan penyaluran BST kepada masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir, selain itu pihaknya juga melakukan perbaikan dan pembaharuan data secara terus menerus jika ditemukan ketidakvalidan data. Selanjutnya, Dinas Sosial juga memvalidasi data untuk memastikan bahwa data yang dibuatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Dinas Sosial dapat diukur dengan menggunakan indikator responsiveness. Dalam hal ini, indikator responsiveness dapat menunjukkan kemampuan Dinas Sosial dalam membantu dan

melayani masyarakat secara cepat, tepat dan tanggap. Kaitannya dengan pemerataan penyaluran BST, Dinas Sosial telah melakukan perbaikan data secara cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan pendataan ulang kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam DTKS dan tidak mendapatkan Dana BST, kemudian melakukan validasi guna memastikan bahwa data yang dibuatnya telah memenuhi persyaratan dan benar adanya.

C. Responsivitas

Responsiveness menurut Dwiyanto (2006:5051) merupakan kemampuan birokrat dalam mengidentifikasi Kebutuhan masyarakat, penyusunan daftar dan prioritas, serta pengembangan kegiatan layanan publik berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari publik. Daya tanggap sebagai indikator kinerja untuk mewakili kecakapan organisasi publik untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Responsivitas merupakan indikator yang berfungsi guna mengukur kinerja organisasi sebab dapat menggambarkan kemampuan organisasi untuk menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan untuk kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Untuk mencapai pemerataan penyaluran BST bagi masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir maka Dinas Sosial melakukan perbaikan dan pembaharuan data yang tidak sesuai, hal ini dilakukan dengan tujuan guna memberikan kesejahteraan. Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat atas pelayanan pemerintah dalam hal ini yang berkaitan dengan penyaluran BST, maka dibuat buku pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan harapan dan aspirasinya melalui aplikasi cek Bansos. Dengan adanya buku pengaduan tersebut, pihak Dinas Sosial dapat memenuhi yang menjadi keinginan dari masyarakat terkait BST. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan aduan atau keinginannya kepada TKSK jika yang bersangkutan tidak bisa datang langsung ke Kantor Dinas Sosial kemudian pihak TKSK menyampaikan aduan atau keinginan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara agar dengan segera petugas Dinas Sosial memperbaiki data. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan dapat mempermudah dan membantu Dinas Sosial untuk mendata ulang masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial. Dengan hal tersebut, pemerataan bantuan sosial tunai bisa terlaksana secara optimal dan tepat sasaran, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan segera terpenuhi.

D. Responsibilitas

Dwiyanto (2006: 5051) mengatakan Responsibilitas adalah pelaksanaan aktivitas birokrasi publik, dilaksanakan sinkron dengan prinsip-prinsip administrasi yang valid dengan menggunakan pedoman birokrasi, baik eksplisit maupun implisit. Responsibilitas dapat dilihat berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur kerja yang berlaku. Pelaksanaan pemerataan penyaluran Dana BST bagi masyarakat miskin yang terdampak covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara telah mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54/Huk/2020 disebutkan dalam poin kesembilan bahwa “Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya”. Dalam pelaksanaan penyaluran Dana sosial ini, Dinas Sosial juga memantau secara langsung pemerataan penyaluran Dana bantuan terlaksana dengan baik atau belum. Apabila dalam proses tersebut, Dinas Sosial menemukan adanya ketidaksesuaian penerima atau penyaluran bantuan belum merata, maka Dinas Sosial mencari tahu melalui TKSK mengenai keluarga tidak mampu namun belum tercatat sebagai penerima. Pada dasarnya, BST diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, dan layak menerima bantuan. Pelaksanaan sosialisasi BST kepada masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir tidak dilakukan oleh Dinas Sosial, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program BST tersebut. Untuk mengoptimalkan

pemerataan penyaluran BST kepada masyarakat maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan bagi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan namun namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dapat mengusulkan dirinya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Adapun dari pihak Dinas Sosial dapat melakukan perbaikan dan pembaharuan data jika ada penambahan daftar masyarakat yang berhak menerima bantuan. Semua yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini semata-mata untuk mewujudkan pemerataan penyaluran BST yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan birokrasi publik sesuai dengan pegawai negeri sipil yang dipilih oleh public Dwiyanto (2006: 5051). Akuntabilitas merupakan indikator untuk menunjukkan konsistensi suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mengukur kinerja suatu organisasi harus melihat tingkat hasil yang diperoleh dalam mencapai targetnya, selain itu juga kinerja yang dihasilkan oleh organisasi harus sesuai dengan Norma dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyaluran BST di Kelurahan Kotabumi Ilir belum merata dan beberapa belum tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyak masyarakat yang dikategorikan mampu namun mendapatkan dana bantuan, dan sebaliknya terdapat masyarakat yang dikategorikan tidak mampu tetapi tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Sehingga, peneliti menilai bahwa pelaksanaan pemerataan penyaluran BST belum akuntabel. Untuk memperbaiki data tersebut, maka Dinas Sosial terus berupaya untuk mengumpulkan informasi mengenai masyarakat miskin dan tidak mampu yang namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara akan mengusulkan data nama-nama penerima baru di setiap tahapnya. Usulan dan perbaikan data tersebut didasarkan pada data penerima yang tercatat dalam DTKS, keluarga miskin, tidak 4.2daftar penerima bantuan sosial lainnya, dan keluarga yang rentan terdampak covid-19. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020, pada poin kesebelas yang mengatakan bahwa “Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.” Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan penyaluran BST di Kelurahan Kotabumi Ilir belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyak masyarakat yang menjadi penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria keluarga penerima manfaat BST. Peneliti juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat BST, akan tetapi nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima BST. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerataan penyaluran BST belum sepenuhnya akuntabel.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

dilaksanakan Rezky Amalia Permata Sari Tahun 2021 yang berjudul “Monitoring dan Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi” Adapun temuan Hasil penelitian ini Penilaian pelaksanaan BPNT juga didasarkan pada enam kriteria: efisiensi, efektivitas, validitas, kewajaran dan akurasi. Masalah terbesar dalam pelaksanaan distribusi bantuan adalah keakuratan penerima atau KPM karena data tidak cepat diperbarui.

Fadhila nur fitria, dkk. (2021) berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020” Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas kesejahteraan tunai (BST) telah direalisasikan dengan optimal. Hal ini dikarenakan BST sebanyak 9 tahap tersebut telah tersalurkan kepada masyarakat sebagai penerima, namun pada 3 tahap terakhir BST disalurkan secara bersamaan dalam satu waktu. Persoalan yang ditemukan selama penyaluran bantuan covid 19 ini yaitu minimnya sosialisasi dari Pemda mengenai adanya bantuan tersebut, alhasil banyak dari masyarakat tidak paham mengenai jenis bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak. Aldi Sajian Tahun 2021, Berjudul berjudul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tangerang”. Adapun temuan hasil penelitian ini yakni menunjukkan standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan program BST di Kota Mataram sangat efektif. Selain itu, dari segi prosedural, meskipun dukungan satu bulan tidak mencukupi, namun dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Dari sisi lingkungan (ekonomi, sosial, politik), pelaksanaan program BST masih kontroversial, terutama dalam masalah di mana masih ditemukan duplikat data dan di KPM. Nindya Cahya Rosadi, Tahun 2021, Berjudul “Inovasi Perizinan Pelayanan Melalui Si-Imut di Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang” Adapun temuan hasil penelitian ini yakni m tepatnya RT 02 RW 03 yang memberikan BST di perumahan Taman Chikande telah dilaksanakan seefektif mungkin dan memenuhi indikator efektivitas, yaitu tercapainya tujuan baik waktu maupun sasarannya, pelaksanaannya terintegrasi, dan masyarakat sudah mulai beradaptasi. Meskipun pemberian bantuan ini sifatnya pasif sebab hanya mengandalkan donasi, sehingga bantuan ini tidak cukup. Fadhila nur fitria, dkk. (2021) dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”. Adapun temuan hasil penelitian ini yakni yang menjadi Persoalan yang ditemukan selama penyaluran bantuan covid 19 ini yaitu minimnya sosialisasi dari Pemda mengenai adanya bantuan tersebut, alhasil banyak dari masyarakat tidak paham mengenai jenis bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak. Berdasarkan indikator ketepatan sasaran, peneliti menilai masih banyak ditemukan ketumpangtindihan data penerima bantuan, sehingga ketepatan sasaran ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Berdasarkan indikator responsivitas, petugas harus memperbaiki dan memperbaharui data penerima dengan cepat dan tanggap, membuat buku pengaduan, serta mengembangkan aplikasi pengecekan Bansos guna memudahkan publik dalam menyampaikan usulan dan komplain. Berdasarkan indikator responsibilitas, pihak Dinas Sosial seharusnya secara langsung mengawasi pelaksanaan aktivitas penyaluran BST kepada masyarakat, mengevaluasi dan memperbaiki data sesuai kondisi di lapangan. Berdasarkan indikator akuntabilitas, kegiatan penyaluran BST di Kelurahan Kotabumi Ilir belum terlaksana secara akuntabel sebab banyak ditemukan data yang tidak valid sejak tahun 2017.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran BST kepada masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir yang dilihat berdasarkan indikator penilaian kinerja yaitu: Tingkat pencapaian produktivitas di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan pemerataan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Kotabumi Ilir dilakukan pemantauan melalui Enumerator dan TKS. Jika ditemukan ketidak validan data, dengan segera pihak Dinas Sosial memperbaiki data tersebut, hal ini dilakukan dengan harapan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan

tersebut; Indikator responsiveness dapat menunjukkan kemampuan Dinas Sosial dalam membantu dan melayani masyarakat secara cepat, tepat dan tanggap. Kaitannya dengan pemerataan penyaluran BST, Dinas Sosial telah melakukan perbaikan data secara cepat, tepat sesaat setelah mengetahui data penerima, Miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam DTKS dan tidak mendapatkan Dana BST, kemudian melakukan validasi guna memastikan bahwa data yang dibuatnya telah memenuhi Persyaratan dan benar adanya; Pelaksanaan penyaluran BST kepada masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan secara responsif oleh Dinas Sosial melalui upaya perbaikan dan pembaruan data-data yang dinilai tidak valid. Pembuatan buku pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan harapan dan aspirasinya dapat dilakukan melalui aplikasi cek Bansos. Dengan adanya buku pengaduan tersebut, pihak Dinas Sosial dapat memenuhi yang menjadi keinginan dari masyarakat terkait BST. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan aduan atau keinginannya kepada TKSK jika yang bersangkutan tidak bisa datang langsung ke Kantor Dinas Sosial kemudian pihak TKSK menyampaikan aduan atau keinginan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara agar dengan segera petugas Dinas Sosial memperbaiki data Untuk mencapai responsibilitas dalam penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Kelurahan Kotabumi Ilir maka diperlukan sosialisasi, namun sosialisasi BST kepada masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir tidak dilakukan oleh Dinas Sosial, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program BST tersebut. Untuk mengoptimalkan pemerataan penyaluran BST kepada masyarakat maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan bagi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan namun namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dapat mengusulkan dirinya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Adapun dari pihak Dinas Sosial dapat melakukan perbaikan dan pembaharuan data jika ada penambahan daftar masyarakat yang berhak menerima bantuan. Hal ini dilandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yaitu keputusan Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020, pada poin keenam; Pelaksanaan penyaluran BST kepada masyarakat di Kelurahan Kotabumi Ilir masih belum akuntabel. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan daftar penerima BST yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga membuat penyaluran Dana BST masih belum merata. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Sinambela saja. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran BST kepada masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Sosial Kotabumi serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Sajian 2021. *Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020*. <http://repository.ummat.ac.id/2384/1/COVER-BAB%20III.pdf>
- Dwiyanto, Agus. 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public*. Yogyakarta
- Fadhila nur fitria, dkk. 2021 *Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020*". <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/5330>
- Nindya Cahya Rosadi, 2021 *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande Jayanti-Tangerang*". <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5313/1/NINDYA%20CAHYA%20ROSADI-FDK.pdf>
- Rezky Amalia Permata Sari. 2021. *Monitoring dan Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*". <http://repository.uinjambi.ac.id/6602/1/Rezky%20Amalia%20Permata%20Sari.pdf>
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan. Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

